

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Fakta menunjukkan bahwa memasuki pesta demokrasi pada pemilihan presiden 2009, bakal banyak calon presiden mulai bermunculan dari latar belakang yang berbeda salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta. Berbagai lembaga riset mulai melakukan survei atau jajak pendapat mengenai calon presiden yang populer di mata rakyat. setidaknya telah muncul 12 nama bakal calon presiden Indonesia 2009-2014. 12 orang itu adalah SBY, Jusuf Kalla, Hidayat Nur Wahid, Megawati, Sultan Hamengku Buwono X, Soetrisno Bachir, Akbar Tanjung, Rizal Mallarangeng, Yusril Ihza Mahendra, Sutiyoso, Wiranto dan Prabowo<sup>1</sup>. Termasuk tokoh aktor yang satu ini Dedy Mizwar. sehingga menjadi perlu untuk membahas nama-nama tersebut agar banyak orang bisa mengetahui dan menilai kelayakan Bakal calon presiden yang akan bermunculan. Dari kriteria pertama, SBY punya nilai yang tinggi. SBY punya komitmen yang besar pada pengungkapan dan penuntasan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Penangkapan dan hukuman terhadap Pollycarpus, penangkapan mantan petinggi BIN Muchdi PR, tidak terlepas dari determinasi SBY sebagai presiden. Sultan juga punya poin positif dalam isu HAM. Sikap sangat toleran dan menghargai hak dan kebebasan rakyat. Dia secara aktif dan tanpa henti

tidak terlalu menonjol, tetapi dia berperan penting dalam membuat deklarasi damai di Malino untuk meredakan konflik horisontal di Poso, juga perdamaian di Aceh. Rizal Mallarangeng juga seorang yang punya komitmen yang kuat pada isu-isu kebebasan politik. Megawati kurang berhasil dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Kasus 27 Juli 1996 tidak dituntaskan pada masa pemerintahannya padahal ia adalah korban dari peristiwa penyerangan terhadap kantor PDI. Pembunuhan tokoh-tokoh politik seperti Munir dan Theys Eluai juga terjadi di masa pemerintahannya. Juga penetapan keadaan darurat militer di Aceh, dan pengiriman pasukan untuk menyelesaikan soal Aceh lewat jalan aksi militer dinilai tidak berlandaskan semangat dan prinsip HAM yang sedang diperjuangkan pada waktu itu.

Akbar Tanjung dalam kapasitasnya sebagai ketua Golkar gagal mendorong partainya untuk mendukung perjuangan para korban dan aktivis HAM yang menginginkan kasus Trisakti, Semanggi I dan II dijadikan kasus pelanggaran HAM berat. Sutiyoso juga disinyalir bertanggung jawab atas kasus 27 Juli dan terkait kasus Timur-Timur. Dalam kasus Timur-Timur, Sutiyoso sempat ditahan di salah satu wilayah di Australia beberapa waktu yang lalu. Sutiyoso juga mendukung sikap para purnawiran yang menolak panggilan Komnas HAM beberapa waktu yang lalu. Kemudian Wiranto dan Prabowo adalah dua tokoh militer yang dianggap paling bertanggung jawab atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Sebagai Panglima TNI, Wiranto banyak

Timur. Sementara Prabowo banyak dinilai bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis HAM.

Sementara dalam soal pemberantasan korupsi, SBY juga punya nilai yang tinggi. Pada masa pemerintahannya, banyak pejabat publik yang ditangkap dan dihukum. Sultan juga punya integritas yang kuat untuk memberantas korupsi. Sementara, Megawati dan Sutiyoso adalah dua bekas pemimpin publik yang tidak terlalu kelihatan menonjol dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan tak lupa juga tokoh publik Akbar Tanjung dan Yusril Ihza Mahendra adalah dua calon yang akan terganjal dengan isu korupsi. Akbar Tanjung meski bebas dalam kasus dana non-budgeter Bulog dan Yusril dalam kasus pencairan dana Tommy Soeharto, cenderung memiliki nilai negatif. Wiranto dan Prabowo adalah dua calon presiden yang dalam kampanyenya di media massa sering menggunakan isu kesejahteraan. Prabowo dalam kapasitasnya sebagai ketua HKTI banyak berbicara tentang perbaikan nasib petani. Meski demikian, pernyataan kedua tokoh politik itu lebih banyak dinilai sebagai retorika. Lalu Sultan adalah calon presiden yang punya nilai paling tinggi diantara calon-calon lainnya. Komitmennya pada nasib rakyat Yogya telah terbukti mendorong popularitasnya, selain karena faktor keturunan. Sultan terlibat aktif dalam isu Pancasila dan kebhinekaan. Yogya adalah tempat yang ramah bagi Ahmadiyah karena faktor Sultan. Rizal juga banyak dinilai memiliki komitmen yang tinggi terhadap pluralisme. Hidayat Nur Wahid dan Yusril memiliki latar belakang partai agama yang lebih mementingkan nilai-nilai Islam ketimbang pluralisme. Berdasarkan ini komitmen mereka terhadap

... dan nilai-nilai lainnya. Untuk kriteria Yusuf Kalla

Sutiyoso, Sultan HB X, dan Akbar Tanjung punya kemampuan manajerial yang tinggi. Dari pengalamannya sebagai pejabat publik, Kalla, Sutiyoso dan Sultan telah membuktikan kapasitasnya dalam mengelola kerja para bawahannya.

Megawati dan Sutiyoso punya nilai yang baik untuk pengalaman, tetapi tidak didukung oleh tingkat pendidikan. Rizal Malaranggeng punya nilai yang tinggi dalam hal pendidikan tetapi minim pengalaman. Kriteria selanjutnya, Megawati, SBY dan Jusuf Kalla punya nilai yang tinggi. Ketiganya bersandar pada mesin partai politik yang besar. Meski mesin partai politik tidak serta merta menentukan kuat tidaknya suatu calon presiden, tetapi adanya partai politik yang besar sangat membantu pemilihan seorang calon presiden. Jusuf Kalla meski menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar, tetapi kekuasaan Kalla di Golkar tidaklah sebesar Megawati di PDIP. Akbar Tanjung bekas ketua umum Partai Golkar masih punya pengaruh dalam tubuh Golkar. Demikian juga dengan Aburizal Bakrie yang punya pengaruh yang besar di tubuh Golkar. Sampai saat ini, kalau ada tokoh Golkar yang agak berbeda pandangan dengan kebijakan resmi Golkar seringkali dihubungkan dengan kubu Akbar Tanjung. Akbar Tanjung meski secara resmi tidak memiliki partai politik tetapi dia punya modal sosial yang cukup besar berupa jaringan HMI dan juga jaringan dalam tubuh Golkar sendiri. Sultan punya modal sosial yang besar berupa jabatannya sebagai raja Yogyakarta, dan hubungan baiknya dengan banyak pihak. Di sisi lain tidak kalah penting juga, seorang aktor perfilman Indonesia juga ikut terlibat dalam bakal calon presiden 2009. Sutradara dan aktor senior Deddy Mizwar membenarkan dirinya akan maju

prihatin melihat nasib bangsa dan rakyat Indonesia yang tidak kunjung sejahtera setelah 60 tahun merdeka."Saya prihatin 200 juta lebih rakyat Indonesia kok hanya ditawarkan calon pemimpin yang hanya itu-itu saja. Sementara Ponari dengan batu ajaibnya, bisa memberikan harapan kesembuhan bagi ribuan rakyat.<sup>2</sup>

Menurut pemeran Jenderal Naga Bonar ini, kesiapannya untuk terlibat dalam kancah politik nasional didorong oleh semangat memberikan warna lain bagi para pemilih. Harapannya rakyat bisa terhibur dengan banyaknya pilihan yang dapat dijadikan tumpuan harapan."Tujuan akhirnya bukan harus menjadi presiden, tetapi memberikan warna lain dan harapan yang mengusahakan kesejahteraan. Kita ini sudah 65 tahun merdeka, kenapa kok tidak sejahtera," kata Deddy Mizwar. Deddy Mizwar mengaku pilihannya untuk maju dalam Pilpres 2009 terpaksa diambil karena dia melihat terjadi kebuntuan kepemimpinan nasional yang menjadi harapan rakyat. Dengan kesiapannya untuk bersaing melawan para tokoh politik nasional dan mantan jenderal itulah, Deddy Mizwar berharap rakyat mendapat pilihan calon pemimpin yang lebih baik. "Ini (capres) sebenarnya pembicaraan yang tak kusukai. Tapi karena saya melihat terjadi kebuntuan kepemimpinan yang membawa kesejahteraan, saya terusik. Terpaksa saya berbicara sesuatu yang tidak kusukai," papar sutradara dan pemain Kiamat Sudah Dekat ini. Hal ini disebabkan karena dia lebih banyak ingin memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat."Yang penting kita jadi bagian dari semangat perubahan ke arah yang lebih baik," kata pria berkumis ini. Saat ditanya mengenai kapan deklarasi pencapresannya dilakukan, Deddy Mizwar

---

<sup>2</sup> *Koran Dunia*, Minggu, 24 Februari 2009, halaman 24 Februari 2009

menjawab diplomatis. "Tunggu saja nanti tanggal mainnya. Hari Jumat nanti di Taman Ismail Marzuki (TIM) akan ada refleksi politik 2 jenderal, yaitu Jenderal Naga Bonar dan Jenderal Saurip Kadi," pungkas aktor kawakan ini sambil tertawa.

Sejauh ini, kata Deddy Mizwar, ia belum menentukan partai mana yang akan dijadikan kendaraan politik baginya untuk meramaikan bursa calon presiden (capres) mendatang. "Saya belum melirik partai yang mana. Tapi setelah ini akan ada komunikasi politik dan semuanya akan terbuka. Komunikasinya akan mulai hari ini," ujarnya. Sementara itu, dalam pidatonya, Deddy Mizwar secara tegas mengaku keinginannya untuk terjun ke dunia politik. "Saya tidak pernah ngomong politik sebelumnya. Kalau saya ngomong, pasti ada suatu dorongan. Ada yang salah dalam negeri ini," ujar Deddy Mizwar. Deddy Mizwar juga sempat menyentil proses demokrasi yang berlangsung di negeri ini. "Pemilu di negeri ini seperti membeli kucing dalam karung karena rakyat enggak tahu siapa yang akan dipilihnya," katanya. Di mata Deddy Mizwar, sudah saatnya Indonesia memiliki pemimpin yang memenuhi persyaratan. Salah satunya, pemimpin yang mempunyai solusi untuk menghentikan keterpurukan, punya paradigma baru tentang sistem kenegaraan Indonesia kedepan, pemimpin yang punya keberanian dan mempunyai integrasi pribadi yang tinggi, bukan janji-janji. Terakhir, pemimpin yang tidak bermasalah. "Bebek aja ada pemimpinnya. Kok kita manusia menghalangi munculnya para pemimpin baru yang ingin memberikan harapan baru untuk menyejahterakan rakyat. Saya siap mengembalikan

Tidak kalah penting dan menarik juga adalah seorang tokoh reformasi yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X yang lahir di Yogyakarta pada 2 April 1946 dengan nama kecil Bendoro Raden Mas (BRM) Herjuni Darpito. Berdasarkan penanggalan Jawa, Sultan lahir pada hari Selasa Wage, 27 Rabiulakhir, Jimawal 1877. Masa kanak-kanak dan masa remajanya dihabiskan di Yogya. Setelah lulus dari SD Keputran I, pada 1959, Hamengku Buwono X melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 3 dan lulus pada 1962. Sultan kemudian mengenyam pendidikan di SMA Negeri 6 dan lulus pada tahun 1965, Perjalanan dalam dunia pendidikan membawa Sultan masuk ke Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, dan lulus pada tahun 1982. Di lingkungan keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sultan mengalami tempaan dalam kepemimpinan dan pengetahuan. Seorang putera kraton, apalagi dari seorang Sultan Hamengku Buwono IX yang perjuangan dan kenegarawanannya telah tertoreh dalam sejarah Republik ini, dia mempelajari banyak hal seraya mencermati perkembangan di sekitarnya. Tidak hanya masalah budaya, tetapi juga politik dan iptek dipelajarinya. Setelah melewati tahap sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, dia dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang diterimanya sebagai sebuah amanah dan pengabdian. Karir Sultan di bidang organisasi juga beragam. Selain aktif di Golkar dengan jabatan Ketua DPD Golkar DI Yogyakarta (1982-1997) dan sekarang menduduki posisi Dewan Penasehat (2004-2009), beliau juga pernah mengemban jabatan Ketua Umum Kadinda DIY (1982-1997) dan Ketua KONI DIY (1990-1998). Visinya mengenai Indonesia berpijak pada kenyataan faktual

1. Lahir pada 2 April 1946 dengan nama kecil Bendoro Raden Mas (BRM) Herjuni Darpito. Pada hari Minggu, tepat pada tanggal 6

Desember 2009 merupakan moment yang tak terlupakan bagi pengurus pusat Keluarga Alumni Gajah Mada ( KAGAMA ) periode 2009-20014 dimana pada acara yang meriah tersebut mereka dilantik dan di kukuhkan sebagai pengurus pusat KAGAMA oleh Ketua Umum KAGAMA Sri Sultan HB X yang terpilih pada MUNAS XI KAGAMA tanggal 24-26 Juli 2009 di Gedung Grha Sabha Pramana UGM.

Dengan kondisi kemaritiman dan keanekaragaman etnis dipandang Sultan sebagai sebuah kekuatan yang mampu menyokong perkembangan bangsa. Kondisi maritim merupakan faktor pemersatu untuk negara kepulauan yang menyimpan berbagai potensi sumber daya alam yang menanti untuk diolah. Teknologi merupakan kunci dalam pengembangan sumber daya ini, sedangkan strategi kebudayaan adalah sarana untuk memberdayakan keanekaragaman masyarakat Indonesia. Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah salah seorang calon presiden (Capres) dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2009. Kecintaan Sultan kepada bangsa dan negara sama besarnya dengan semangatnya untuk selalu mengabdikan kepada rakyat. Sebagai seorang Raja Jawa yang hidup di zaman modern, Sultan telah membuktikan dirinya sebagai sosok pemimpin yang dicintai rakyatnya. Sultan telah mengemban tugas sebagai Gubernur DI Yogyakarta selama dua periode sejak 2002. Selama masa pengabdian tersebut, berbagai kemajuan telah diraih oleh daerah dan masyarakat DI Yogyakarta. Berbagai kemajuan itu antara lain menjadikan DI Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka di Indonesia yang didukung oleh masyarakat yang berilmu



Ngayogyakarta Hadiningrat dengan dijiwai iman, dan taqwa yang mampu mengharmonisasi budaya modern dan daerah.

Selain itu, Sultan menjadikan DI Yogyakarta sebagai daerah otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, profesional, transparan dan akuntabel, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis, dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konsep pembangunan, Sultan menjadikan DI Yogyakarta sebagai wilayah pembangunan terpadu, komplementatif serta didukung oleh pelibatan secara langsung peran masyarakat dalam pembangunan daerah, melalui ketahanan sosial, budaya, dan sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan. Di sektor pariwisata, peran Sultan telah menjadikan DI Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata MICE (*Meeting Incentive, Conference, and exhibition*) utama di Indonesia, sekaligus mengembalikan posisi provinsi ini sebagai daerah tujuan wisata kedua setelah Bali. Dalam konsep pengembangan industri, mengarahkan DI Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan industri sedang dan kecil, nonpolutan serta industri rumah tangga modern yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna. Berbagai kemajuan itu dapat terwujud berkat kepemimpinan, keterampilan, dan kemampuan intelektual yang *mumpuni* dari Sultan. Kemampuan tersebut dimilikinya karena didukung oleh latar belakang pendidikan di bidang ketatanegaraan semasa Sultan kuliah pada Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada. Integritas, ketegaran, dan kepemimpinan Sultan semakin diuji karena dengan kondisi Yogyakarta yang dilanda gempa bumi pada Mei 2006

berkekuatan 5,9-6,2 pada skala Richter yang menewaskan lebih dari 6.000

orang dan melukai puluhan ribu orang lainnya. Berkat prinsip melayani yang melekat dalam setiap tindakannya, yang diwariskan dari ayahandanya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sultan telah berhasil mengajak masyarakat Yogyakarta agar optimis menghadapi musibah tersebut dan segera membangun kembali dari puing-puing reruntuhan menjadi semangat pantang menyerah.

Berkembangnya masyarakat, baik secara sosial dan ekonomi maupun politik, apalagi pascareformasi, telah mendorong Sultan untuk terus meningkatkan peran dan sumbangsinya bagi bangsa dan negara. Kiprah Sultan tidak hanya terbatas pada lingkup daerah di seputaran Yogyakarta, tetapi juga dalam kancah nasional. Pada periode pertama jabatannya sebagai gubernur, Sultan juga menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Golkar DI Yogyakarta. Sultan kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat DPD Golkar Tingkat I DI Yogyakarta. Saat ini, Sultan dipercaya menjadi anggota Dewan Penasehat Partai Golkar. Ketika Sri Sultan HB X akhirnya menyatakan kesediaannya menjadi calon presiden untuk Pemilihan Umum 2009, tentulah tebersit dalam benak beliau sejumlah alasan yang *reasonable* yang melatarbelakangi pernyataan itu. Mari berandai-andai tulisan ini bisa ikut menjelaskan alasan-alasan di belakang keputusan yang jelas tak gampang itu. Seperti diketahui, Sri Sultan Hamengku buwono X baru menyatakan siap maju menjadi calon presiden pada 28 Oktober 2008 setelah sebelumnya selalu menjawab kepada media dengan jawaban yang tidak jelas. Ada jawaban yang memperlihatkan taktiknya. "Saya tidak mau menjadi jago *belehan*," kata Sri Sultan Hamengku buwono X yogyakarta. *Jago*

Sri Sultan Hamengku Buwono X Yogyakarta beralasan soal undang-undang. Sering juga beliau menyatakan menunggu permintaan rakyat dan partai untuk mau dicalonkan.

Fakta itu menunjukkan bahwa Sri Sultan Hamengku buwono X Yogyakarta tidak gegabah dalam menyatakan keputusannya dan sudah mempertimbangkan aspek-aspek obyektif dan aspek-aspek subyektif yang mengitari persoalan pencalonan presiden. Ada aspek-aspek obyektif yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Pertama, Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa partai dan gabungan partai yang berhasil mengumpulkan suara 20 persen berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden<sup>3</sup>. Undang-undang ini otomatis juga menutup kemungkinan calon presiden dari kalangan independen. Secara tidak langsung, undang-undang ini hanya akan menghasilkan dua calon presiden dari partai-partai besar.

Kondisi ini kurang sehat untuk pengembangan demokrasi. Karena itu, dibutuhkan satu calon alternatif yang kuat. Kedua, adanya partai, yaitu Partai Republik Nusantara yang dipimpin oleh cendekiawan Muslim Abdurrahman, yang meminta Sri Sultan Hamengku buwono X bersedia dicalonkan menjadi presiden pada Pemilu 2009. Dukungan riil partai ini, walaupun dari partai baru dan belum jelas dukungan rakyat yang kemungkinannya diperolehnya, ditunggu oleh

---

<sup>3</sup> RM Talib Puspokusumo, mantan Konsul Jenderal RI di Houston, Texas, Amerika Serikat. Koran Tempo Edisi 04 februari 2009. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden

Sri Sultan Hamengku Buwono X seperti dinyatakan oleh beliau dalam beberapa kesempatan kepada media. Maklumlah, walaupun Sri Sultan Hamengku Buwono X Yogyakarta kader Golongan Karya yang berpengaruh, Golkar sebagai partai baru akan menentukan calon presiden setelah mengetahui hasil pemilu legislatif pada 2009. Ketiga, adanya permintaan dan dukungan sebagian masyarakat Yogyakarta dan sejumlah raja se-Nusantara kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk maju menjadi calon presiden. Dukungan itu nyata dan diperlukan oleh Sri Sultan X, yang masih memegang teguh amanat orang tuanya, Sri Sultan IX, yang berpesan agar Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak berambisi mengejar kekuasaan. Permintaan sebagian masyarakat itu menjadi pembenaran atas kesediaannya dengan niat untuk mengabdikan kepada masyarakat untuk dicalonkan menjadi presiden. Keempat, adanya tim kemudian disebut Tim Pelangi, yang dipimpin oleh pengamat politik Sukardi Rinakit dan sineas Garin Nugroho yang mendorong dan membuka wawasan Sri Sultan X agar bersedia mencalonkan diri menjadi presiden. Di mata Sukardi Rinakit, Sri Sultan X adalah satu dari empat tokoh reformasi bersama Amien Rais, Megawati, dan Abdurrahman Wahid yang belum memperoleh kesempatan untuk memegang kekuasaan di tingkat pemerintah pusat.

Selain faktor-faktor obyektif, ada sejumlah faktor subyektif yang melatarbelakangi kesediaan Sri Sultan X untuk menjadi calon presiden. Pertama, panggilan nurani. Dengar saja pertimbangannya untuk pencalonan itu. "Ingin perubahan. Saya tidak tahan dengan penderitaan masyarakat, rakyat tetap miskin

mengubah bangsa ini untuk maju, sejahtera, dan pemerintah yang akuntabel," kata Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam Pisowanan Agung di Yogyakarta, 28 Oktober 2008, seperti dikutip media-media. Kesediaan Sri Sultan X menjadi calon presiden secara tidak langsung merupakan kritik atas kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai kurang berhasil, kalau tidak dikatakan gagal, memajukan dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Dalam arti lain, Sri Sultan Hamengku Buwono X Yogyakarta yang tak berambisi menjadi presiden "terpaksa" turun tangan untuk "memberesi" Indonesia. Ketidakberhasilan pemerintah Yudhoyono ini sebetulnya juga bisa dilihat indikasinya dari banyaknya tokoh yang berani mencalonkan diri menjadi presiden. Kedua, faktor usia. Sri Sultan Hamengku Buwono X kini berusia 62 tahun. Kalau beliau tidak mencalonkan diri sebagai presiden pada 2009, beliau pasti akan kehilangan momentum. Sekarang saja sudah sangat santer isu agar calon presiden berusia muda di bawah 40 tahun apalagi lima tahun mendatang. Momentum Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah Pemilu 2009.

Lihat saja, dengan Undang-Undang Pemilu yang diberlakukan sekarang, praktis diperkirakan hanya partai besar Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memenuhi syarat untuk mengajukan calon presiden. Karna pada undang – undang pemilihan umum Nomor 10 tahun 2008 pada bab III ( tiga ) bahwa peserta dan persyaratan mengikuti pemilu sebagai berikut<sup>4</sup>. Pasal 8

(1 ) partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang – undang tentang partai politik;
- b. Memiliki kepengurusan di  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) jumlah provinsi
- c. Memiliki kepengurusan di  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
- d. Menyertakan sekurang – kurangnya 30% ( tiga puluh perseratus ) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- e. Memiliki anggota sekurang – kurangnya 1.000 (seribu) orang atau  $\frac{1}{1.000}$  ( satu perseribu ) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- f. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c;
- g. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

Padahal PDIP tak punya alternatif calon presiden selain Megawati, dan

Call 1... linear k... mendukung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai

presiden yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (Ketua Umum Partai Golkar) sebagai wakil presiden. Melihat isu perkembangan serta popularitas Sri Sultan Hamengku Buwono X Yogyakarta sebagai calon Presiden sungguh sangat luar biasa khususnya daerah istimewa Yogyakarta karna dalam basis dan dukungannya dalam Pilpres tersebut cukup besar dan kuat.

Disamping sebuah bentuk dukungan ada juga yang kontra terhadap Sri Sultan HB X Yogyakarta, tampaknya perjalanan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai salah satu calon presiden pada pemilihan presiden mendatang, tidak berjalan mulus. Buktinya, mendapat perlawanan dari sekelompok orang yang tergabung dalam wadah Pamong Budaya Nusantara. Dengan dalih menyayangkan sikap Raja Keraton Ngayogyakarta, yang ngotot maju sebagai capres. Paling tidak sikap itu ditunjukkan pada Deklarasi Pamong Budaya Nusantara di Pendopo Tamansiswa, Yogyakarta, Selasa (10/2). Hadir dalam acara itu, Ketua Majelis Luhur Tamansiswa, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto. Mereka menyayangkan majunya Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai capres. Mereka mengaku sebagai masyarakat yang masih mencintai Keistimewaan DIY, perlu menyampaikan itu. Menurut pemrakarsa Pamong Budaya Nusantara, Heni Astiyanto SH, berharap agar para aktor politik saat ini jangan mengeksploitasi Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk kepentingan sesaat. Mereka menilai posisi Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, sebagai perekat budaya bangsa lebih bagus bila bersedia lebih berkonsentrasi di Yogyakarta. Apalagi RUU Keistimewaan, masih memerlukan perjuangan Sultan. "Lebih bagus beliau

perjuangan beliau," kata Heny Istiyanto di sela-sela deklarasi Pamong Budaya Nusantara di Pendopo Tamansiswa, Yogyakarta. "Kita takut malah dua-duanya nanti tidak didapat, baik sebagai presiden maupun gubernur," tambah Heny Istiyanto. Meski demikian, ia tidak sependapat bila gerakan Pamong Budaya Nusantara dikatakan sebagai gerakan uang menentang pencapresan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kehadiran mantan KSAD Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, sama sekali bukan ingin menggembosi Sultan sebagai capres yang kebetulan berasal dari kalangan nonmiliter. "Bukan penggembosan. Justru beliau ini kami posisikan lebih baik," katanya.

Pamong Budaya Nusantara juga menilai banyaknya parpol yang memiliki visi dan misi yang beragam pada Pemilu mendatang, akan mencabik-cabik semangat pluralisme di masyarakat. Di sisi lain mereka juga berharap agar eksistensi Kota Yogyakarta, sebagai tamansari budaya dunia tidak boleh dirusak dan dinodai oleh kepentingan politik praktis. Selain itu, mereka juga menyerukan agar masyarakat Yogyakarta untuk memposisikan Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi panutan, dan pengikat kemajemukan yang ada di Yogyakarta. Disamping, kata dia, Keraton Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan perlu dijaga eksistensinya<sup>5</sup>.

Selain itu, mereka berharap agar para aktor politik tidak mengeksploitasi Sultan untuk kepentingan sesaat. Secara terpisah Bondan Nusantara, Wakil Sekjen Merti Nusantara ketika dikonfirmasi mengenai perlawanan tersebut mengatakan,

<sup>5</sup> G. M. H. G. ... Gerakan Budaya Nusantara Serahkan Sultan Main Sebagai Capres



timbulnya pro kontra adalah pertanda positif bagi tumbuhnya alam demokrasi. Sebab, lanjut Bondan, fondasi demokrasi yang dibangun almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan dikembangkan Sultan HB X jelas memberi bukti konkret bahwa DIY tidak menganut sistem monarki absolut. Munculnya penolakan terhadap permintaan rakyat atas pencalonan Sultan HB X menjadi capres merupakan disharmoni sejarah. "Kenapa saat Sultan HB IX menjadi Menhan dan Wapres tidak ada seorang pun yang protes atau menolak?," katanya. "Adakah kepentingan lain dibalik penolakan itu?," tambah Bondan dengan nada bertanya. Merti Nusantara yakin, masyarakat Yogyakarta sudah sangat dewasa untuk memilih dan menentukan sikap terhadap semua pilihan yang ada.

Berangkat dari sebuah isu tentang pencalonan Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta diatas pada akhirnya muncul sebuah gagasan dari Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X akhirnya meminta maaf pada masyarakat Indonesia, terutama pada para pendukungnya atas kegagalannya maju sebagai kandidat capres pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. "Saya hanya dapat bilang terima kasih dan minta maaf kepada masyarakat yang telah mendukung saya sebagai capres, karena tidak bisa memenuhi harapan," katanya di Yogyakarta, Sabtu. Sri Sultan Hamengku Buwono X mengakui langkah politiknya mencapai kursi presiden telah gagal. Sebagai konsekuensinya akan mempertanggungjawabkan kepada konstituennya dengan mengumumkan secara terbuka masalah ini. Gubernur Provinsi D.I Yogyakarta mengisyaratkan forum yang digunakan mengumumkan tidak sebesar

alun Utara Kota Yogyakarta, 28 Oktober 2008. Dia mengaku keagalannya mencapai capres sama halnya mengecewakan konstituen atau rakyat yang mendukungnya. Karena itu, dia menyatakan secara tulus akan mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf secara resmi. "Saya hanya bisa menyampaikan terima kasih dan minta maaaf karena gagal untuk memenuhi harapan rakyat menjadi calon presiden 2009," ujar dia

### **B. Rumusan Masalah**

Faktor – faktor apa yang menyebabkan kegagalan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai calon Presiden 2009..?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan di bahas adalah apa yang menjadi faktor penyebab kegagalan Sri Sultan Hamengkubuwono X yogyakarta sebagai calon presiden 2009. dalam hal ini bahwa yang menyebabkan kegagalan Sri Sultan Hamengkubuwono x sebagai calon presiden yaitu: Adanya Komunikasi Politik Yang Tidak Tepat Dalam Tubuh Partai politik golongan karya, Minimnya pendidikan politik masyarakat yang bersih, Tidak adanya sikap konsistensi politik Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta, Minimnya anggaran partai politik RepublikAN dan minimnya dukungan partai republik nusantara pada pemilihan umum 2009, serta minimnya sosialisasi Sri Sultan Hamengkubuwono X

... dan dikabarnya sebagai calon presiden 2009 khususnya ditengah

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab kegagalan Sri Sultan Hamengkubuwono X yogyakarta untuk maju sebagai capres 2009.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai kegagalan Sri Sultan Hamengkubuwono X yogyakarta sebagai calon Presiden 2009 hal ini merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu politik.

2. manfaat Praktis

- a. untuk dijadikan sebuah pelajaran dalam kehidupan masyarakat jogja yang pada umumnya dan khususnya untuk diri sendiri.
- b. Bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan serta pengalaman sebagai calon presiden 2009 pada partai politik.

#### **F. Kerangka Teori**

1. Elit

Mulanya “ teori Elit Politik” lahir dari diskusi seru oleh para

), Laswell (Ilmuwan Politik) dan sosiologi C. Wright Mills,<sup>6</sup> yang melacak tulisan – tulisan dari para pemikir Eropa masa awal munculnya fasisme, khususnya Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca ( Itali ), Roberto Michels (seorang Jerman keturunan swiss) dan Jose Ortega Y. Pareto (1848-1923) Percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang – orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat. Dan mereka terdiri dari para pengacara, mekanik, bajingan atau para gundik.

Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda umumnya datang dari kelas yang sama,; yaitu orang – orang yang kaya juga pandai, yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan lain sebagainya. Karena itu menurut Pareto, masyarakat terdiri dari 2 kelas : (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi kedalam elit yang memerintah ( *Governing Elit* ) dan elit yang tidak memerintah ( *Non-Governing Elit* ), (2) Lapisan yang lebih rendah, Yaitu non-elit. Pareto sendiri memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah, yang menurut dia , berkuasa karena bisa menggabungkan kekuasaan dan kelicikkan, yang dilihat sebagai hal yang sangat penting.

Dalam setiap masyarakat ada gerakan – gerakan yang tak dapat ditahan dari individu – individu dan elit – elit kelas bawah hingga atas, dari tingkat bawah ketingkat atas yang melahirkan sesuatu; peningkatan yang luar biasa pada unsur – unsur yang melorotkan kelas – kelas pemegang kekuasaan, yang pada pihak lain justru malah meningkatkan unsur – unsur kualitas superior; pada kelompok – kelompok lainnya. Kiranya inilah yang menjadi perhatian utama Pareto. Disamping itu juga bahwa Pareto, Mosca juga percaya dengan teori pergantian Elit. Karakteristik yang membedakan Elit adalah” kecakapan untuk memimpin dan menjalankan control politik” sekali kelas yang memerintah tersebut kehilangan kecakapannya dan orang – orang yang diluar kelas tersebut menunjukkan kecakapan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan diganti oleh kelas penguasa yang baru.

Setelah perang dunia pertama teori – teori tentang elit, kelompok dan kekuasaan tampaknya telah di ganderungi di Amerika. Masing – masing mengklaim dirinya sebagai teori yang paling canggih. Teori elit misalnya menegaskan bahwa ialah yang bersandar pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencangkup antara lain adalah

- a. Sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan
- b. Sejumlah besar massa yang di takdirkan untuk diperintah.

Meskipun pada mulanya teori ini diperuntukkan untuk eropa barat dan tengah

Amerika ia diserap dengan baik untuk menjelaskan proses – proses politik yang ada di Negara mereka dan Negara – negara demokratis lainnya. Konsep dasar teori yang lahir di eropa ini mengemukakan bahwa didalam kelompok penguasa ( *the ruling class* ) selain ada elit yang berkuasa ( *the ruling elite* ) juga ada elit tandingan, yang mampu meraih kekuasaan melalui massa jika elit yang berkuasa kehilangan kemampuan untuk memerintah. Dalam hal ini, massa memegang sejenis control jarak jauh atas elit yang berkuasa, tetapi karena mereka tak begitu acuh dengan permainan kekuasaan, maka tak bisa diharapkan mereka menggunakan pengaruhnya<sup>7</sup> Apabila seseorang mulai mendalami teori – teori ini, dia akan mengetahui bahwa dibelakang teori – teori kelompok dan elit, kekuasaan merupakan tujuan utamanya.

Untuk lebih menekankan pentingnya teori elit politik, Ortega Y. Gasset (1833-1955) Mengembangkan teorinya tentang massa. Menurut Ortega, kebesaran suatu bangsa tergantung pada kemampuan “rakyat”, “ Masyarakat umumnya”, “kerumunan”, “ massa” untuk menemukan suatu symbol dalam orang pilihan tertentu, kepada siapa mereka mencurahkan segala antusiasme vital mereka yang luas”. Orang terpilih adalah orang – orang yang terkenal dan merekalah yang membimbing massa”, yang tidak terpilih seperti mereka. Suatu bangsa merupakan suatu massa yang terorganisir, yang disusun oleh suatu minoritas individu yang terpilih.

---

<sup>7</sup> Untuk suatu kritik tentang basis teoritis studi elit lihat Robert Dahl, *Who Governs?*, Yale University Press, 1961, dan Nelson W. Polsby, *Community Power and Political Theory*, Yale University Press, 1963, dan untuk kritik secara umum lihat James Burnham, *The Machiavellians: Defenders of Freedom*, London, Putnam & Co., 1943, James H. Meisel, *The Myth of The Ruling Class: Gaetano Mosca and the Elit*, University of Michigan Random House, 1963; T.B. Bottomore, *Elites and society*, Penguin Books, 1964.

## 2. Massa

Dalam memahami konstelasi dan rivalitas politik elit, perlu juga dipahami tentang fenomena dan perilaku massa. Untuk memetakan perubahan politik di masyarakat antar waktu misalnya, kita bisa meminjam kategori teoritik dari *Amitai Etzioni* yang membagi masyarakat atau massa politik ke dalam tiga kategori besar. (1) massa moral; (2) massa kalkulatif; dan (3) massa alienatif. Massa moral adalah massa yang potensial terikat secara politik pada satu Orsospol karena loyalitas normatif yang dimilikinya. Massa moral bersifat tradisional, cenderung kurang atau tidak kritis terhadap krisis-krisis empirik. Massa kalkulatif adalah massa yang memiliki sifat-sifat yang amat peduli dan kritis terhadap krisis-krisis empirik yang dihadapi oleh masyarakat di sekelilingnya. Massa ini akrab dengan modernitas, sebagian besar menempati lapisan tengah masyarakat, memiliki sifat kosmopolit (berpandangan mendunia) dan punya perhitungan (kalkulasi) terhadap berbagai interaksi. Massa alienatif adalah massa yang teralienasi (terasingkan) dan pasrah pada mobilisasi politik. Dalam konteks konflik elit, peran massa kadang-kadang dimanipulasi untuk tujuan-tujuan tertentu berdasarkan kepentingan elit politiknya. Tak jarang mereka juga mempunyai motif, kepentingan dan tujuan yang berbeda beda.

## 3. Pemilihan Presiden secara langsung

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut

U. 1. U. 1. D. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah

penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibentuk suatu Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu perlu dilakukan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang ini mengatur mekanisme pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam Undang-Undang ini diatur beberapa substansi penting yang signifikan antara lain mengenai persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib memiliki visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dalam



dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden harus mengundurkan diri pada saat didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Selain para Menteri, Undang-Undang ini juga mewajibkan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengundurkan diri apabila dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pengunduran diri para pejabat negara tersebut dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan. Untuk menjaga etika penyelenggaraan pemerintahan, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota perlu meminta izin kepada Presiden pada saat dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih adalah pemimpin bangsa, bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu saja, untuk itu, dalam rangka membangun etika pemerintahan terdapat semangat bahwa Presiden atau Wakil Presiden terpilih tidak merangkap jabatan sebagai Pimpinan Partai Politik yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing Partai politik.

#### **a. Rancangan undang – undang Pilpres**

Sebelum memasuki pesta demokrasi di Indonesia pada pemilihan presiden secara langsung 2009. ada sebuah draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang

"Minggu depan atau sekitar tanggal 29 Maret, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari masing-masing fraksi diharapkan sudah masuk. Karena mulai 5 April DPR memasuki masa reses, maka pembahasannya kemungkinan baru dilakukan pada awal Mei 2008," kata anggota panitia khusus ( Pansus ) RUU Pilpres DPR Agus Purnomo di Jakarta, Jumat. Agus yang merupakan anggota Fraksi PKS itu mengatakan, sejumlah persoalan yang muncul di masyarakat seperti yang terkait dengan persyaratan pencalonan presiden, masih merupakan wacana karena DIM dari fraksi-fraksi belum secara resmi diserahkan.

Ia juga menambahkan, pembahasan RUU Pilpres kemungkinan tidak akan memakan waktu lama mengingat jumlah pasal yang dibahas jauh lebih sedikit (tidak lebih dari 200 pasal) jika dibandingkan dengan UU Pemilu yang baru beberapa waktu lalu disahkan. Agus menambahkan, sejumlah pasal yang kemungkinan bakal menjadi masalah krusial antara lain menyangkut syarat pencalonan, sengketa hasil pemilihan, serta masalah dana kampanye calon presiden/wakil presiden. Terkait syarat pencalonan, katanya, Fraksi PKS akan mengusulkan agar syarat pengajuan calon presiden dalam UU Pilpres yang lama (UU No.23 Tahun 2003) tidak diubah yakni tetap dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol yang meraih minimal 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara pemilu legislatif.

Selain itu, F-PKS juga akan mengusulkan syarat maksimal usia capres/cawapres adalah 60 tahun dan minimal berpendidikan sarjana (S1)

Selain itu, F-PKS juga akan mengusulkan syarat maksimal usia capres/cawapres adalah 60 tahun dan minimal berpendidikan sarjana (S1)

persoalan adalah data kependudukan yang terkait dengan data pemilih potensial. "Masalah ini harus diantisipasi agar tidak terjadi "permainan" terutama oleh calon *incumben* seperti yang terjadi dalam sejumlah pemilihan kepala daerah," katanya. Menyangkut dana kampanye, lanjut Agus Purnomo, perlu diantisipasi agar calon *incumben* tidak menggunakan fasilitas negara atau dana "terselubung" seperti dana dari luar negeri atau orang di luar negeri yang memfasilitasi dilakukannya survei atau jajak pendapat yang mengarah pada calon tertentu. "Selain itu, perlu juga diantisipasi agar kasus seperti dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang diberikan kepada tim kampanye sejumlah calon presiden pada Pilpres 2004 tidak terulang lagi," katanya.

#### **b. Syarat Capres Dipermudah, Tamatan SMU Boleh Maju**

Perdebatan panjang tentang persyaratan calon presiden mulai menemui titik terang. Lobi Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pemerintah di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (4/7), akhirnya memuluskan jalan bagi seseorang yang berasal dari lulusan sekolah menengah umum untuk maju sebagai calon presiden. Syarat seorang terdakwa dengan ancaman maksimal lima tahun menjadi calon presiden juga diloloskan, seperti yang diminta oleh Partai Golongan Karya. Fraksi Partai Golkar, F-Reformasi, dan F-Partai Bulan Bintang yang cukup *ngotot* dengan prasyarat sarjana tampaknya memilih jalan kompromi. Prasyarat minimal perolehan suara atau *electoral threshold* 20 persen bagi partai untuk mengajukan

persen. Hal ini setelah fraksi terbesar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan sinyal menyetujui hal tersebut. Dalam dialog dengan reporter Arief Suditomo di Studio *SCTV* Jakarta, petang tadi, anggota Panja RUU Pilpres Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, hasil itu ditempuh setelah masing-masing fraksi bersedia kompromi. Agun secara tidak langsung mengakui, bahwa kesepakatan itu sedikitnya karena ada tarik menarik kepentingan partai.

Namun anggota F-PDI Perjuangan ini menegaskan, hasil itu lebih banyak karena masing-masing fraksi berpandangan bahwa saat ini yang terpenting adalah mencari calon presiden yang dibutuhkan masyarakat. "Golkar pun sejak awal lobi mengatakan bahwa sedang mencari presiden yang dibutuhkan masyarakat yang bisa mengatasi krisis multidimensional," kata Agun. Artinya, kata Agun, diperlukan sejumlah persyaratan yang kualitatif sehingga menghasilkan seorang presiden terbaik pilihan masyarakat. Karenanya, F-PDI Perjuangan menawarkan alternatif untuk menerima berbagai usulan. Seorang terpidana sekali pun tidak masalah. Tapi masalah persyaratan pendidikan pun harus disetujui.

Karena pada dasarnya, kata Agun, anggota Dewan berusaha realistis supaya aturan UU Pilpres nantinya tidak bertentangan secara prinsip dengan objektivitas yang ada di masyarakat. Itulah sebabnya, masing-masing fraksi di DPR bersepakat untuk tidak saling membatasi dan menjegal di antara kandidat masing-masing partai. "Toh pemilu presiden ini akan dipilih secara langsung oleh rakyat. Biarlah rakyat yang memilih. Mau memilih pendidikan rendah, yang tidak sehat jasmani?," ujar Agun, memberi opsi. Menyoal perolehan suara yang diturunkan

20 persen hanya menimbulkan kesan untuk menguntungkan partai besar semata. Ini juga karena Dewan tidak ingin pembuatan aturan RUU ini secara tidak langsung membatasi hak-hak seseorang untuk maju menjadi capres. "Untuk Pemilu 2004 kita sepakati perolehan kursi DPR tiga persen dan lima persen dari perolehan pemilu. Jadi yang dipakai sekarang dari peraturan peralihan," kata Agun. Bahkan Golkar yang semula mengusulkan 35 persen kini bersedia menurunkan persentase.

Agun menambahkan, kesepakatan baru ini sama sekali bukan karena adanya tekanan dari partai kecil. Masing-masing anggota fraksi hanya ingin tidak ada pembatasan kepada setiap orang untuk maju menjadi presiden. Hingga Jumat sore tadi, Rapat Kerja Panja RUU Pilpres dengan pemerintah dalam rangka proses pengambilan keputusan tingkat satu masih berlangsung. Rencananya, proses pengambilan keputusan tingkat dua dilaksanakan pada Senin pekan depan. "Hingga tadi, seluruh substansi materi disepakati tidak ada yang akan diputuskan melalui voting. Nampaknya Senin depan tidak ada lagi hal-hal yang akan dimantahkan lagi," cetus Agun, berharap. (DEN/Imelda Sari).

### **c. Kompromi Politik Diakui Mewarnai Kesepakatan RUU Pilpres**

Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden dan Calon Presiden Jumat kemarin akan ditindaklanjuti dengan pembahasan soal berbagai pasal penjelasan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu (5/7) ini. Selain itu, akan diperbaiki pula kesalahan ketik atau ejaan RUU Pilpres

yang akan dihadiri sembilan dari 24 anggota Pansus ini diyakini tak bakal mempengaruhi draf rancangan yang telah disepakati tersebut. Sejumlah anggota tim perumus mengakui, lolosnya beberapa pasal kontroversial memang akibat dari adanya tawar-menawar antara partai-partai besar. Misalnya, soal diperbolehkannya pencalonan seseorang menjadi presiden, meski tak bergelar sarjana ataupun menyandang status terpidana lima tahun penjara. Kedua poin tersebut diduga hasil kompromi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk meloloskan Megawati Sukarnoputri yang lulusan sekolah menengah umum dan Partai Golongan Karya yang memperjuangkan Akbar Tandjung yang tersangkut kasus korupsi dana nonbujeter Badan Urusan Logistik. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa juga akhirnya mendukung, karena hal itu akan menghilangkan syarat capres harus sehat jasmani rohani, tentunya buat meloloskan Abdurrahman Wahid. Sedangkan berbagai partai kecil juga tak ketinggalan memuluskan berbagai pasal krusial tersebut.

Langkah ini dilakukan untuk memperoleh kompensasi penghilangan syarat calon presiden harus memperoleh dukungan minimal tiga persen dari partainya. Rapat kerja Pansus kemarin juga membahas pasal yang mengatur pelaksanaan kampanye melalui debat publik atau debat terbuka antarcalon. Setelah melalui lobi, akhirnya disepakati poin ini dihapus. Wakil Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursyidan meminta, agar hasil rapat kerja antara Panja RUU Pilpres dan pemerintah tersebut tak dinilai secara tendensius. Sebab bagaimana pun, menurut dia, semua itu tak akan mempengaruhi perolehan kemenangan suara dalam pemilihan presiden pada Pemilihan Umum 2004. "Kita harus yakin, sekecil

apapun partai, rakyat bisa *milih*," kata Ferry. Wakil Pansus Yusuf Muhammad juga yakin, masyarakat sudah pintar dan memiliki hati nurani untuk memilah mana calon pemimpin yang layak memimpin bangsa ini. "Apa yang dipertunjukkan di elite bukan tak diketahui mereka [rakyat]," ungkap Yusuf. (MTA/Olivia Rosalia dan Erwin Arief)

#### **d. DPR Setuju Pengesahan RUU Pilpres**

Seluruh fraksi di DPR akhirnya secara aklamasi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden menjadi Undang-undang. Salah satu pasal penting yang akhirnya disepakati adalah persyaratan partai politik dalam mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam rapat paripurna yang berlangsung Rabu (29/10), seluruh fraksi kecuali Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyetujui persyaratan 25 persen perolehan suara Pemilu atau 20 persen kursi legislatif bagi parpol yang akan mengajukan capres dan cawapres. Meski setuju, PAN mengeluarkan nota keberatan. PAN tetap berpendapat partai cukup memperoleh 15 persen kursi legislatif dan 20 persen suara perolehan suara pemilu, seperti Undang-undang nomor 23 tahun 2003. Hal lain yang tidak disetujui PAN adalah tidak diaturnya mundurnya pimpinan parpol yang terpilih menjadi presiden dan wapres dalam RUU Pilpres. Soal ini Partai Keadilan Sosial dan Partai Kebangkitan Bangsa juga sependapat dengan PAN. Meski masih menyisakan perbedaan pendapat, Ketua Panitia Khusus RUU Pilpres, Ferry Mursyidan Baldan, mengaku, RUU Pilpres sudah optimal. Sembilan fraksi di DPR akhirnya sepakat partai harus memiliki minimal 20 persen

Kesepakatan ini relatif membuat persaingan menuju kursi presiden terbatas. Angka setinggi itu hanya memungkinkan munculnya dua atau tiga calon presiden saja. Partai-partai besar seperti Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentu paling diuntungkan. Dengan posisi jumlah kursi DPR sekarang mereka aman mengajukan pasangan capres dan cawapres.

Sementara partai-partai menengah dan kecil tentu harus berkoalisi untuk memenuhi syarat tersebut. Dengan angka 25 persen suara pemilu muncul pula harapan agar pemilihan presiden berlangsung hanya satu putaran. Namun skenario ini sulit dilakukan karena dalam RUU Pilpres penentuan presiden terpilih harus memperoleh 50 persen suara lebih. Dari 560 kursi yang tersedia di DPR pada Pemilu 2009, maka angka 20 persen setara dengan 112 kursi. Inilah angka minimal untuk menggolkan pasangan capres dan cawapres. Mau tidak mau partai kecil dan menengah harus melakukan koalisi untuk mencapai itu. Namun besarnya syarat pencapresan itu bisa membentuk pemerintahan yang kuat dan dukungan yang kuat pula dari parlemen. Ini untuk tidak mengulang kasus Presiden SBY yang berasal dari partai kecil dan kerap mendapat serangan bertubi-tubi dari legislatif atas kebijakannya, seperti saat akan menaikkan harga bahan bakar minyak. Undang-undang Pilpres seharusnya memiliki masa pakai yang panjang. Jangan sampai undang-undang ini direvisi setiap akan pemilu sekedar mengikuti





mengukur variabel. Berdasarkan pengertian tersebut maka indikator-indikator yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

1. Perilaku elit politik

- Tingkat respon terhadap pendukung.
- Konsistensi elit pada massa atau pendukung yang terorganisir.

2. peran massa

- Tingkat dukungan massa kepada partai politik.
- Tindak lanjut pendukung terhadap parpol.

3. Undang – Undang Pilpres 2009

- Tingkat efektifitas dan efisiensi undang – undang pemilihan presiden 2009.
- Tindak lanjut keluhan para elit terhadap UU pilpres 2009.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menggambarkan, menganalisa serta menggali data – data secara detail dan mendalam mengenai pokok permasalahan penelitian yang sesuai dengan

kebutuhan penelitian. Penelitian diskriptif dimaksudkan untuk mendiskripsikan data – data yang terkait dengan analisa kegagalan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai calon Presiden Indonesia 2009 yang diperoleh berdasarkan fakta yang diasumsikan sesuai dengan objek penelitian.

## 2. Jenis Data

### a. Data primer

Yaitu data yang berhubungan erat terhadap permasalahan yang terkait dengan pokok penelitian diatas. Dimana data dan informasi yang dibutuhkan berasal dari sumber pertama, biasanya data atau informasi diperoleh melalui wawancara dengan informan .dan data tersebut dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.

### b. Data sekunder

Yaitu data yang dibutuhkan secara tidak langsung atau bukan dari sumber utama, yaitu berupa data – data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dengan hanya cara membaca, melihat atau mendengarkan. untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti, Penelitian ini biasanya menggunakan studi kepustakaan atau mengutip data yang berasal dari media cetak atau pihak lain yang berasal dari data primer yang sudah di olah oleh peneliti sebelumnya

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi ialah merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat – surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan – bahan tulisan lainnya<sup>9</sup> Peneliti akan mengkaji data tentang kegagalan Sri Sultan Hamengkubuwono X yogyakarta yang terkait dengan pokok permasalahan diatas.

#### b. Wawancara

Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (face to face) dengan narasumber. Namun, bisa juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet atau surat (wawancara tertulis)<sup>10</sup>. Dalam hal ini Peneliti akan memperoleh data penelitian melalui tanya jawab secara langsung terhadap beberapa partai politik dan organisasi mert nusantara yogyakarta. Diantaranya adalah ( Ibu Sukarti ) sebagai tim sukses Sri Sultan HB X dari partai Republika Nusantara sebagai ketua DPD yogyakarta, Golkar ( jon. S. Keban ) sebagai narasumber, Partai Pesatuan Pembangunan ( HM. Syukri Fadholi. SH ) Ketua fraksi PPP sebagai narasumber. Kemudian Terhadap Partai Demokrasi Indonesia ( pak Bambang ) sebagai nara

---

<sup>9</sup> Jonathan Sarwono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Cetakan Pertama. Penerbit Graha Ilmu 2006.

sumber dari sekretaris PDIP. dan kepada Organisasi Merti Nusantara terhadap ( pak bondan ) sebagai pendukung Sri Sulan HB X Yogyakarta. Penulis melakukan wawancara untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan dengan tim sukses dan Organisasi Merah Putih Nusantara sebagai organisasi pendukung.

#### c. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian – kejadian, perilaku, obyek – obyek yang dilihat dan hal – hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya observasi yang terfokus yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola – pola perilaku dan hubungan terus – menerus terjadi<sup>11</sup>.

#### 4. Teknik Analisis Data

Yang digunakan yaitu analisis kualitatif adalah analisis data yang mendasar pada data – data yang ada, teknik analisis kualitatif terdiri menjadi beberapa jalur yaitu triangulasi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis kualitatif diibaratkan oleh Bogdan, seperti orang mau piknik, sehingga ia baru tahu tempat yang akan dituju, tetapi belum tahu pasti apa yang ditempati itu. Ia akan tahu setelah memasuki obyek, dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar – gambar, berfikir dan melihat obyek dan

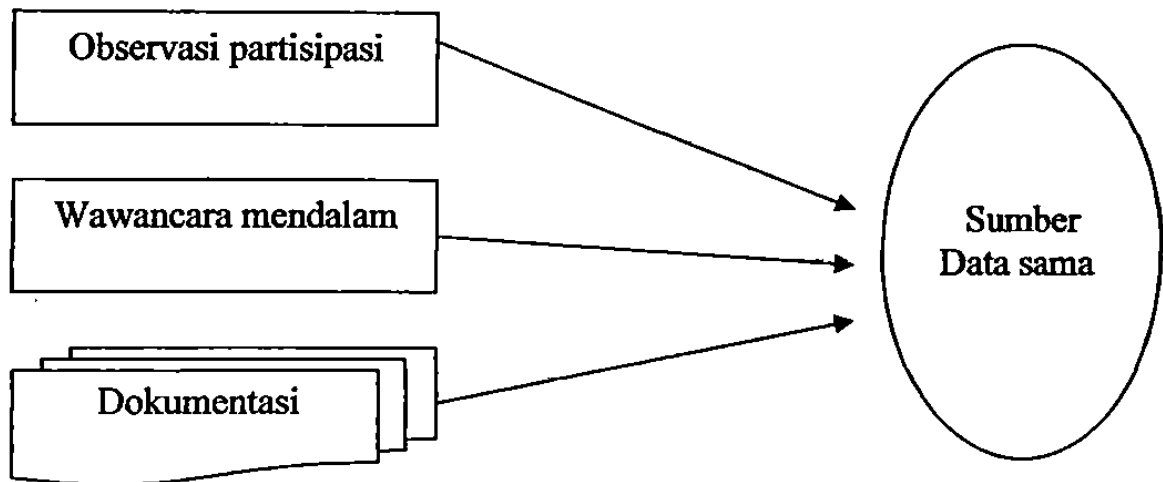
<sup>11</sup> Bogdan, R. (1988). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Cetakan pertama 2006.

aktivitas orang yang ada di sekelilingnya, melakukan wawancara dan sebagainya<sup>12</sup>.

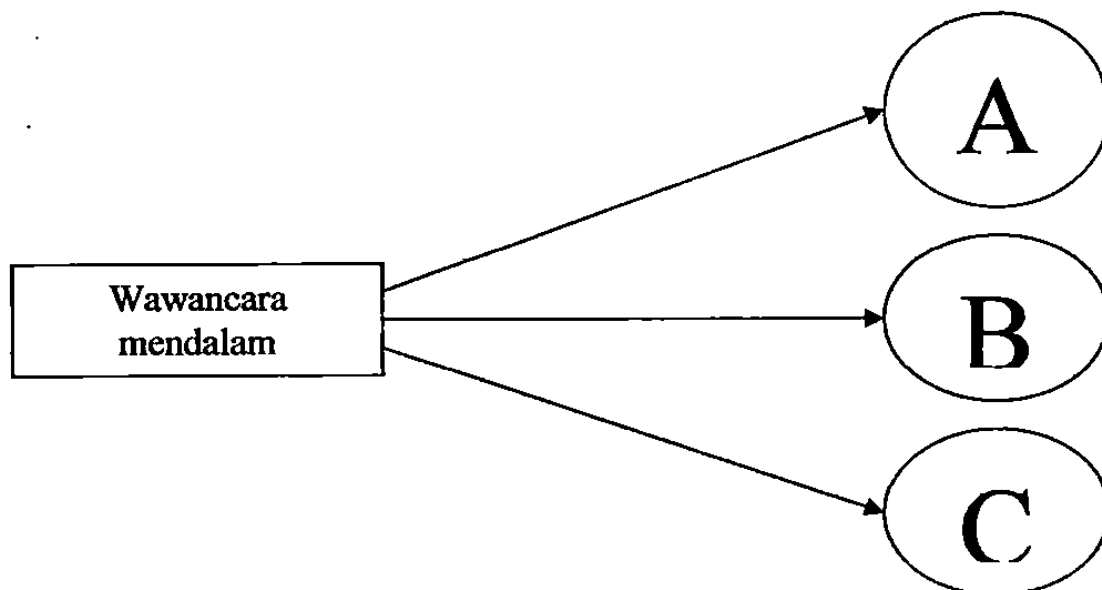
#### a. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data<sup>13</sup>. Dalam hal triangulasi, Susan Staiback ( 1988 ) menyatakan bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan. Selanjutnya Bogdan menyatakan tujuan penelitian kualitatif bukan semata – mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitar. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum.

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda – beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang samasecara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda – beda dengan teknik yang sama. Hal ini dapat digambarkan seperti 1.1 a dan 1.2 b berikut.



Gambar 1.1. Triangulasi " teknik " pengumpulan data ( bermacam – macam cara pada sumber yang sama ).



Gambar 1.2. triangulasi " Sumber " pengumpulan data . ( satu teknik

pengumpulan data pada bermacam – macam sumber data A, B, dan C )

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber data dengan berbagai cara, dan berbagai waktu ( Wiliam Wiersma, 1986 ). Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

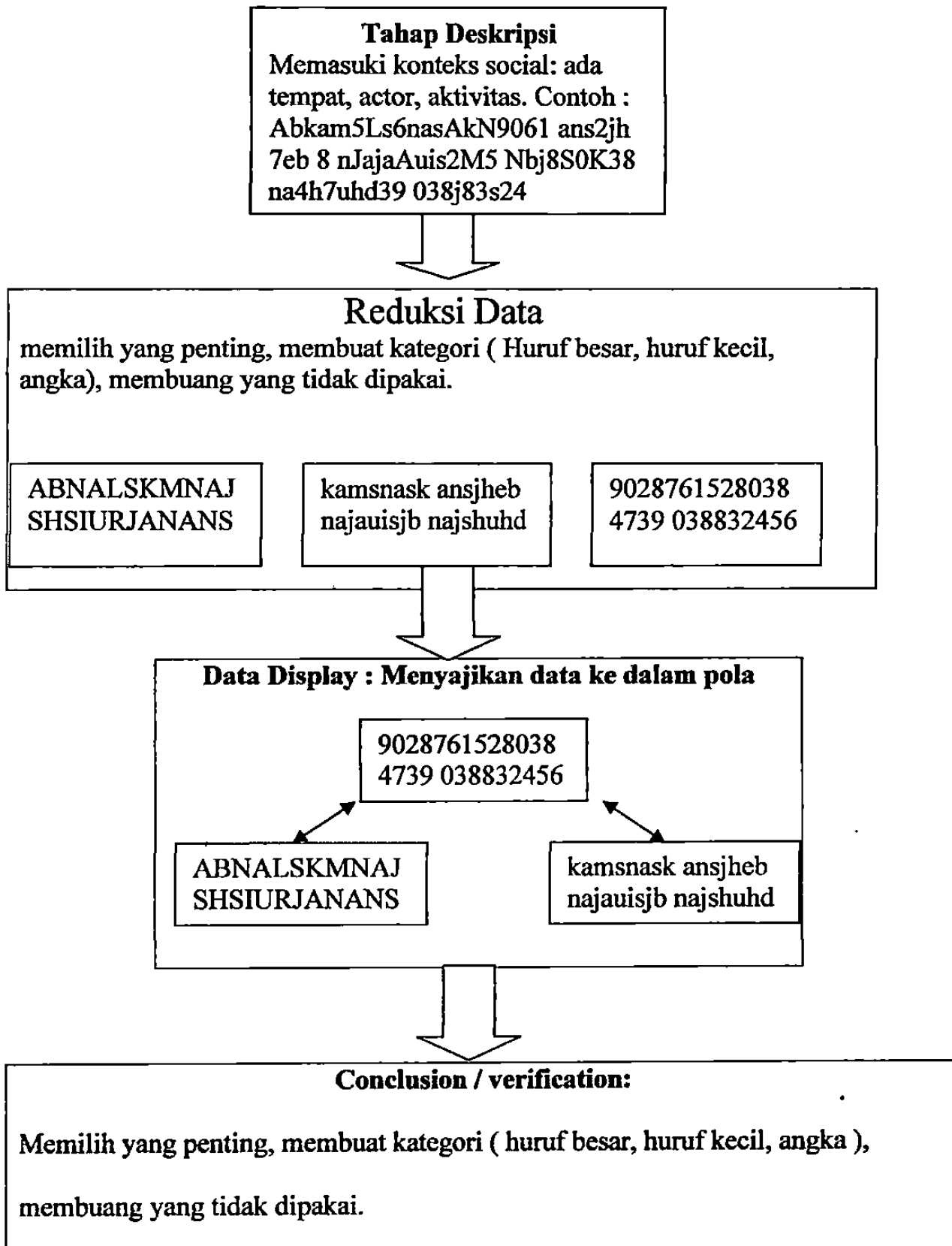
#### b. Reduksi Data

Tahap selanjutnya Reduksi data atau fokus pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Pada proses reduksi ini, peneliti mereduksi data yang ditemukan pada tahap 1 untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna, dan baru<sup>14</sup>. Data yang tidak dipakai disingkirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data – data tersebut selanjutnya dikelompok menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian.

#### c. Penyajian Data

Setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data atau penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dala hal ini Miles and Huberman ( 1984 ) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerj selanjutnya bedasarkan apa yang telah dipahami.





#### d. Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya masih samang – samang atau galar<sup>15</sup>